



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN UNTUK KECAMATAN
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang, :
- a. bahwa pupuk mempunyai peranan penting dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, telah menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentan/ OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/ Permentan/ SR.140/8/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/ Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/ Kpts/ OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1971/Kpts/OT.160/5/2012 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi di Tingkat Pusat;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN UNTUK KECAMATAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Camat adalah Camat se Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani disektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan Jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

5. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani di sektor pertanian.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/ kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Sektor Pertanian adalah Sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makanan Ternak dan Budidaya Ikan/ Udang.
8. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia perorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/ atau peternakan.
9. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk Urea, SP-36, ZA, dan atau NPK serta Pupuk Organik di dalam Negeri.
10. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah, yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
11. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (Petani / pekebun).
12. Kelompok Tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
13. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
14. Dinas Kabupaten terkait adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil, Menengah Perindustrian Perdagangan dan Pasar dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
15. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
16. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan.
17. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan.
18. Lini II adalah gudang produsen yang berlokasi di wilayah ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
19. Lini III adalah gudang produsen dan/atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk dan ditetapkan oleh produsen.
20. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh distributor.
21. Tim Pelaksana Harian Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida tingkat Kecamatan adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

22. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II

PERUNTUKAN

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani telah bergabung dalam Kelompoktani dengan ketentuan :
 - a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam.
 - b. Petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan usulan rencana kebutuhan pupuk dari kecamatan dengan memperhatikan anjuran pemupukan berimbang, spesifik lokasi dan standar teknis serta kebutuhan pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, subsektor, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai dengan XV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan diketahui oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV

REALOKASI

Pasal 4

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di kabupaten/ kota terjadi kekurangan, akan dipenuhi melalui realokasi antar kabupaten/ kota, waktu dan subsektor, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Realokasi antar kabupaten/ kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi.
 - b. Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

- c. Kabupaten Pesisir Selatan yang mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau realokasi antar kecamatan dalam suatu kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu Kabupaten/ Kota dan Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/ atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui penetapan realokas

Pasal 5

- (1) Realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan apabila serapan pupuk bersubsidi terus menerus melebihi 100 (seratus) persen.
- (2) Apabila realokasi di kecamatan tidak dapat dilakukan karena daya serap pupuk bersubsidi melebihi 100 (seratus) persen untuk subsektor, maka Bupati mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB V

JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.

Bagian Kedua

Harga Eceran Tertinggi

Pasal 7

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|------------------|---------------------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp. 1.800,- per kg; |
| b. Pupuk SP-36 | = Rp. 2.000,- per kg; |
| c. Pupuk ZA | = Rp. 1.400,- per kg; |
| d. Pupuk NPK | = Rp. 2.300,- per kg; dan |
| e. Pupuk Organik | = Rp. 500,- per kg |

- (2) HET pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh Petani dan Pekebun di kios pengecer resmi secara tunai dalam kemasan karung sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea = 50 Kg.
- b. Pupuk SP-36 = 50 Kg.
- c. Pupuk ZA = 50 Kg.
- d. Pupuk NPK = 50 Kg.
- e. Pupuk Organik = 40 Kg.

Pasal 8

- (3) Kemasan karung pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) harus diberi label tambahan yang berbunyi “ *Pupuk Bersubsidi Pemerintah* “ “ *Barang Dalam Pengawasan* “ yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus.

Bagian Ketiga

Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pasal 9

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen, distributor pupuk dan pengecer resmi pupuk yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 10

- (1) Distributor pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan oleh produsen setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Distributor pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai gudang di kecamatan yang menjadi wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 11

- (1) Pengecer resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan oleh distributor setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dan atau Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari satu distributor yang menunjuknya.

Pasal 12

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Produsen melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di gudang Lini II dan lini III produsen kepada distributor di wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari gudang Lini III Distributor kepada pengecer di wilayah tanggung jawabnya;
 - c. Dalam pelaksanaan pengangkutan, distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi.
 - d. Pengecer resmi melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV kepada petani/kelompok tani/ Pekebun;
 - e. Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari kios pengecer ke kelompok tani/petani/ pekebun dilakukan dengan berpedoman kepada Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok yang disampaikan oleh masing – masing Dinas terkait pada awal tahun dan diberlakukan untuk satu tahun; dan,
 - f. Jika kebutuhan jumlah pupuk bersubsidi kurang dibandingkan dengan kebutuhan pupuk sebagaimana tercantum dalam rekap RDKK, maka penyaluran pupuk kepada kelompok tani / petani oleh kios pengecer dihitung dengan berpedoman kepada proporsi alokasi pupuk dan kebutuhan pada rekapitulasi RDKK;
- (2) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani, dan/ atau kelompok tani dapat dilakukan melalui pendampingan oleh petugas penyuluh di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 13

Pengecer resmi harus memasang papan nama yang dilengkapi dengan papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah, ditempat yang mudah dilihat dan terbaca oleh pembeli.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

- (1) Produsen, distributor pupuk dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Distributor dan pengecer resmi wajib menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan 2 (dua) minggu ke depannya.
- (3) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pasal 15

Distributor pupuk dan pengecer resmi dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/ atau diluar wilayah tanggung jawabnya.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (2) Produsen berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk dimasing – masing wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dan Pelaksana Harian Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kecamatan wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (4) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dan Pelaksana Harian Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Produsen wajib menyampaikan laporan bulanan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi secara berkala kepada Dinas Kabupaten Terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Distributor pupuk wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan penyediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Produsen dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten Terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pesisir Selatan.
- (3) Pengecer resmi wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor pupuk dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten Pesisir Selatan Terkait.
- (4) Laporan penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dirinci menurut kecamatan dan subsektor.

Pasal 18

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten melaporkan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Bupati.
- (2) Pelaksana Harian Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kecamatan menyampaikan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Camat selaku Koordinator Pelaksana Harian Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestida Kecamatan menyampaikan laporan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Gubernur.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi terhadap produsen, distributor dan pengecer resmi yang melanggar ketentuan pasal 12 dan pasal 13.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran tertulis, dan/ atau ;
 - b. Mengusulkan kepada produsen untuk dicabut sebagai distributor pupuk atau pengecer resmi pupuk bersubsidi.

Pasal 21

- (1) Apabila distributor pupuk bersubsidi dan kios pengecer resmi terbukti melakukan penyimpangan/ penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pemerintah kabupaten dapat mencabut rekomendasi mengenai usaha perdagangan pupuk bersubsidi.
- (2) Dalam hal pencabutan rekomendasi terhadap distributor pupuk bersubsidi ~~sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen berkewajiban~~ memberhentikan yang bersangkutan sebagai distributor.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi terhadap pengecer resmi, distributor wajib memberhentikan pengecer resmi yang bersangkutan sebagai pengecer.

Pasal 22

- (1) Apabila distributor pupuk tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kios pengecer resmi yang tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Distributor wajib memberikan sanksi kepada pengecer resmi yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya kepada Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Kabupaten.
- (4) Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Kabupaten dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran kepada distributor yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal **22** Januari 2016

BUPATI PESIR SELATAN

A L W I S

Diundangkan di Painan
Pada tanggal **22** Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN**

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2016 NOMOR : 1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 JANUARI 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN UNTUK KECAMATAN DI KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2016

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK KECAMATAN
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 MENURUT SUB SEKTOR**

NO	SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (TON)					JUMLAH
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1	TANAMAN PANGAN	7056,18	2405,71	1752,13	5806,93	1974,25	18995,20
2	HORTIKULTURA	116,95	53,62	30,07	100,88	60,45	361,97
3	PERKEBUNAN	148,00	62,00	120,00	447,00	30,00	807,00
JUMLAH		7.321,13	2.521,33	1.902,20	6.354,81	2.064,70	20.164,17

Pj. BUPATI PESISIR SELATAN,

A L W I S

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 JANUARI 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN UNTUK KECAMATAN DI KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK KECAMATAN TAHUN 2016

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	JUMLAH
1	Kec. Koto XI Tarusan	543,12	187,36	134,34	442,66	153,31	1460,79
	a. Tanam Pangan	532,12	181,06	130,37	428,66	147,81	1420,02
	b. Hortikultura	8,00	5,00	1,97	6,00	4,00	24,97
	c. Perkebunan	3,00	1,30	2,00	8,00	1,50	15,80
2	Kec. Bayang	686,46	236,00	172,00	579,34	193,85	1867,65
	a. Tanam Pangan	674,46	229,50	165,50	543,34	187,35	1800,15
	b. Hortikultura	8,00	4,50	2,50	9,00	5,00	29,00
	c. Perkebunan	4,00	2,00	4,00	27,00	1,50	38,50
3	Kec. Bayang Utara	163,30	56,17	41,07	131,58	47,21	439,33
	a. Tanam Pangan	156,85	49,87	35,97	118,08	40,71	401,48
	b. Hortikultura	4,45	5,00	2,60	5,50	5,00	22,55
	c. Perkebunan	2,00	1,30	2,50	8,00	1,50	15,30
4	Kec. IV Jurai	321,76	109,83	81,30	275,41	89,44	877,74
	a. Tanam Pangan	308,76	102,83	74,15	243,41	83,94	813,09
	b. Hortikultura	10,00	5,00	2,65	9,00	4,00	30,65
	c. Perkebunan	3,00	2,00	4,50	23,00	1,50	34,00
5	Kec. Batang Kapas	463,75	158,26	116,28	392,53	129,82	1260,64
	a. Tanam Pangan	453,25	152,26	109,83	360,53	124,32	1200,19
	b. Hortikultura	7,50	4,00	2,45	7,00	4,00	24,95
	c. Perkebunan	3,00	2,00	4,00	25,00	1,50	35,50
6	Kec. Sutera	716,66	244,53	177,84	595,50	198,27	1932,80
	a. Tanam Pangan	692,16	235,53	169,84	557,50	192,27	1847,30
	b. Hortikultura	10,50	5,00	2,00	6,00	4,00	27,50
	c. Perkebunan	14,00	4,00	6,00	32,00	2,00	58,00
7	Kec. Lengayang	727,78	286,33	207,64	697,30	231,99	2151,04
	a. Tanam Pangan	701,78	276,83	199,64	655,30	225,99	2059,54
	b. Hortikultura	12,00	5,00	2,00	7,00	4,00	30,00
	c. Perkebunan	14,00	4,50	6,00	35,00	2,00	61,50
8	Kec. Ranah Pesisir	792,15	255,53	189,66	626,43	208,18	2071,95
	a. Tanam Pangan	766,15	247,03	177,71	583,43	201,18	1975,50
	b. Hortikultura	11,00	3,00	2,45	9,00	5,00	30,45
	c. Perkebunan	15,00	5,50	9,50	34,00	2,00	66,00
9	Kec. Linggo Sari Baganti	564,79	191,69	144,40	477,84	156,94	1535,66
	a. Tanam Pangan	539,79	183,69	132,45	434,84	149,94	1440,71
	b. Hortikultura	10,00	3,00	2,45	9,00	5,00	29,45
	c. Perkebunan	15,00	5,00	9,50	34,00	2,00	65,50
10	Kec. Pancung Soal	449,74	156,46	118,93	390,62	127,59	1243,34
	a. Tanam Pangan	437,74	148,96	107,43	352,62	121,59	1168,34
	b. Hortikultura	5,00	4,00	2,00	5,00	4,00	20,00
	c. Perkebunan	7,00	3,50	9,50	33,00	2,00	55,00
11	Kec. Air Pura	426,00	137,85	107,58	348,39	114,70	1134,52
	a. Tanam Pangan	411,50	133,23	96,08	315,39	108,75	1064,95
	b. Hortikultura	7,50	1,12	2,00	5,00	3,45	19,07
	c. Perkebunan	7,00	3,50	9,50	28,00	2,50	50,50
12	Kec. Basa Ampek Balai Tapan	273,40	90,95	69,02	229,48	70,67	733,52
	a. Tanam Pangan	256,40	80,45	58,02	190,48	65,67	651,02
	b. Hortikultura	6,00	3,50	1,50	7,00	3,00	21,00
	c. Perkebunan	11,00	7,00	9,50	32,00	2,00	61,50

13	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	327,16	108,84	86,48	279,02	88,10	889,60
	a. Tanam Pangan	309,16	101,84	73,48	241,02	83,10	808,60
	b. Hortikultura	7,00	1,00	1,00	6,00	3,00	18,00
	c. Perkebunan	11,00	6,00	12,00	32,00	2,00	63,00
14	Kec. Lunang	652,92	257,39	170,60	555,98	179,31	1816,20
	a. Tanam Pangan	625,92	246,49	153,10	502,60	173,31	1701,42
	b. Hortikultura	8,00	3,50	1,50	5,38	3,00	21,38
	c. Perkebunan	19,00	7,40	16,00	48,00	3,00	93,40
15	Kec. Silaut	212,14	44,14	85,06	332,73	75,32	749,39
	a. Tanam Pangan	190,14	36,14	68,56	279,73	68,32	642,89
	b. Hortikultura	2,00	1,00	1,00	5,00	4,00	13,00
	c. Perkebunan	20,00	7,00	15,50	48,00	3,00	93,50
	JUMLAH	7.321,13	2.521,33	1.902,20	6.354,81	2.064,70	20.164,17

Pj. BUPATI PESIIR SELATAN,

ALWIS

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 JANUARI 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

SEKTOR PERTANIAN UNTUK KECAMATAN DI KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2016

Kebutuhan Pupuk Urca Bersubsidi Untuk Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Koto XI Tarusan	55,19	6,70	15,12	76,79	107,68	34,98	6,48	11,02	24,30	4,54	102,06	87,26	532,12
2	Bayang	45,90	59,40	54,00	78,30	89,10	32,18	18,04	57,46	88,02	24,30	70,2	57,56	674,46
3	IV Nagari Bayang Utara	16,20	27,97	11,77	0,54	1,62	4,43	0,54	30,56	22,14	8,10	5,4	17,28	146,55
4	IV Jurai	2,38	51,30	57,78	15,98	3,56	11,88	11,45	22,45	62,96	17,82	19,22	25,38	302,16
5	Batang Kapas	21,82	16,20	42,66	56,43	40,72	53,14	10,13	15,66	55,62	14,69	37,8	83,38	448,25
6	Sutera	13,50	13,50	15,65	124,20	129,60	36,72	14,58	46,98	84,24	73,22	91,26	48,71	692,16
7	Lengayang	22,14	37,25	49,90	138,56	157,14	35,64	11,45	61,56	65,02	89,64	111,78	65,66	813,56
8	Ranah Pesisir	54,00	54,00	11,18	49,25	114,59	94,50	32,08	21,60	44,82	32,40	101,52	66,42	726,26
9	Linggo Sari Baganti	10,80	10,80	13,18	40,50	140,40	35,75	21,60	5,40	18,36	34,67	131,43	46,01	539,79
10	Pancung Soal	27,00	40,07	24,95	5,40	46,98	34,78	22,68	29,70	92,88	22,68	21,6	64,58	437,73
11	Airpura	10,80	13,50	16,20	16,20	27,00	45,58	30,78	7,78	13,50	27,54	21,6	43,20	391,50
12	Basa Ampek Balai Tapan	9,72	6,59	10,80	26,46	36,18	17,06	15,97	2,16	18,90	10,80	20,3	98,82	236,40
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	10,80	18,04	25,38	1,08	76,14	16,20	0,54	16,20	16,20	0,97	54,03	141,37	299,16
14	Lunang	109,62	54,00	1,08	2,22	136,62	75,82	17,82	25,00	14,92	17,94	18,81	17,51	625,95
15	Silaat	10,30	11,46	11,18	19,10	17,36	10,46	16,09	25,00	14,92	17,94	18,81	17,51	190,13
J U M L A H		420,17	420,78	360,83	651,01	1.124,69	539,12	230,23	390,36	741,87	412,79	872,67	891,66	7.056,18

872,67

BUPATI PESIR SELATAN,

A L W I S

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 JANUARI 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN UNTUK KEKAMATAN DI KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2016

Kebutuhan Pupuk SP-36 Bersubsidi Untuk Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Oktr	Nov	Des	
1	Koto XI Tarusan	18,78	2,28	5,15	26,13	36,64	11,90	2,20	3,75	8,27	1,54	34,73	29,69	181,06
2	Bayang	15,62	20,21	18,38	26,64	30,32	10,95	6,14	19,55	29,95	8,26	23,89	19,59	229,50
3	IV Nagari Bayang Utara	5,51	9,52	4,01	0,18	0,55	1,51	0,18	10,40	7,53	2,76	1,84	5,88	49,87
4	IV Jurai	0,81	17,46	19,66	5,44	1,21	4,04	3,90	7,64	21,43	6,06	6,54	8,64	102,83
5	Batang Kipas	7,42	5,50	14,50	19,88	13,85	18,08	2,54	5,33	18,93	5,00	12,86	28,37	152,26
6	Sutera	4,59	4,59	5,33	42,26	44,10	12,50	4,96	15,99	28,67	24,92	31,05	16,57	235,53
7	Lengayang	7,53	12,68	16,98	47,15	53,47	12,13	3,90	12,53	40,83	11,39	38,04	20,20	276,83
8	Ranah Pesisir	18,38	18,38	3,12	16,76	38,99	32,16	10,90	20,93	22,12	30,50	22,34	12,45	247,03
9	Linggo Sari Baganti	3,68	3,68	4,48	13,78	47,78	12,16	7,35	7,35	15,25	11,03	34,55	22,60	183,69
10	Pancung Soal	9,19	13,63	8,49	1,84	15,99	11,83	7,72	1,84	6,25	11,80	44,72	15,66	148,96
11	Airpura	3,68	4,59	5,51	5,52	9,19	15,51	10,47	10,11	31,60	7,72	7,35	21,98	133,23
12	Basa Ampek Balai Tapan	3,31	2,24	3,68	9,00	12,31	5,81	5,44	2,65	4,59	9,37	7,35	14,70	80,45
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	3,68	6,14	8,64	0,40	25,91	5,51	0,18	0,74	6,43	3,68	6,90	33,63	101,84
14	Lunang	40,13	21,23	3,22	2,92	49,34	28,65	8,91	8,36	8,36	3,18	21,23	50,96	246,49
15	Silaut	1,13	1,52	1,42	4,12	3,53	1,18	3,09	6,13	2,70	3,72	4,02	3,58	36,14
J U M L A H		143,44	143,65	122,57	222,02	383,18	183,92	77,88	133,30	252,91	140,93	297,41	304,50	2.405,71

BUPATI PESIR SELATAN,

ALVYS

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 JANUARI 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN UNTUK KECAMATAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016

Kebutuhan Pupuk ZA Bersubsidi Untuk Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Koto XI Tarusan	13,54	1,64	3,71	18,84	26,24	8,59	1,59	2,70	5,96	1,11	25,04	21,41	130,37
2	Bayang	11,26	14,58	13,25	19,21	21,86	7,90	4,43	14,10	21,60	5,96	17,23	14,12	165,50
3	IV Negeri Bayang Utara	3,98	6,86	2,89	0,13	0,40	1,09	0,13	7,50	5,43	1,99	1,33	4,24	35,97
4	IV Jurai	0,58	12,59	14,18	3,92	0,87	2,92	2,81	5,51	15,45	4,37	4,72	6,23	74,15
5	Batang Kapas	5,35	3,98	10,47	14,34	9,99	13,04	1,83	3,84	13,65	3,60	9,28	20,46	109,83
6	Sutera	3,31	3,31	3,84	30,48	31,80	9,01	3,58	11,53	20,67	17,97	22,39	11,95	169,84
7	Lengayang	5,43	9,14	12,24	34,00	38,56	8,75	2,81	9,04	29,44	8,22	27,43	14,58	199,64
8	Ranah Pesisir	13,25	13,25	2,25	12,08	28,12	23,19	7,87	15,11	15,95	22,00	16,11	8,53	177,71
9	Linggo Sari Baganti	2,65	2,65	3,23	9,94	34,45	8,77	5,30	5,30	11,00	7,95	24,91	16,30	132,45
10	Pancung Soal	6,63	9,83	6,12	1,33	11,53	8,53	5,57	1,33	4,51	8,51	32,25	11,29	107,43
11	Airpura	2,65	3,31	3,98	3,98	6,63	11,18	7,55	7,29	22,79	5,57	5,30	15,85	96,08
12	Basa Ampek Balai Tapan	2,39	1,62	2,65	6,49	8,88	4,19	3,92	1,91	3,31	6,76	5,30	10,60	58,02
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	2,65	4,43	6,23	0,27	18,68	3,98	0,19	0,53	4,64	2,65	4,98	24,25	73,48
14	Lunang	26,90	13,25	0,27	0,05	33,52	18,60	4,37	3,98	3,98	0,24	13,25	34,69	153,10
15	Silaut	4,61	4,82	4,77	6,23	5,91	4,64	5,67	7,31	5,46	6,01	6,17	6,96	68,56
J U M L A H		105,18	105,26	90,08	161,29	277,44	134,38	57,62	96,98	183,84	102,91	215,69	221,46	1.752,13

BUPATI PESISIR SELATAN,

AL R I S

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2016
 TANGGAL : 02 JANUARI 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN UNTUK KEKAMATAN DI KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2016

Kebutuhan Pupuk NPK Bersubsidi Untuk Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Marct	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Koto XI Tarusan	44,46	5,39	12,18	61,86	86,74	28,19	5,22	8,87	19,58	3,65	82,22	70,30	428,66
2	Bayang	36,98	47,85	43,50	63,08	71,78	25,93	14,53	46,28	70,91	19,58	56,55	46,37	543,34
3	IV Nagari Bayang Utara	13,05	22,53	9,48	0,44	1,31	3,57	0,44	24,62	17,84	6,53	4,35	13,92	118,08
4	IV Jurai	1,91	41,33	46,55	12,88	2,87	9,57	9,22	18,10	50,72	14,36	15,45	20,45	243,41
5	Batang Kapas	17,57	13,05	34,37	47,07	32,80	42,80	6,00	12,62	44,81	11,83	30,45	67,16	360,53
6	Sutera	10,88	10,88	12,60	100,05	104,40	29,58	11,75	37,85	67,80	58,95	73,52	39,24	557,50
7	Lengayang	17,84	30,02	40,19	111,62	126,50	28,71	9,22	29,67	96,66	26,97	90,05	47,85	655,30
8	Ranah Pesisir	43,50	43,50	7,40	39,67	92,31	76,13	25,84	49,59	52,37	72,21	52,90	28,01	583,43
9	Linggo Sari Baganti	8,70	8,70	10,61	32,63	113,10	28,80	17,40	17,40	36,11	26,10	81,78	53,51	434,84
10	Pancung Soal	21,75	32,28	20,10	4,35	37,85	28,01	18,27	4,35	14,79	27,93	105,88	37,06	352,62
11	Airpura	8,70	10,88	13,05	13,05	21,75	36,71	24,80	23,93	74,82	18,27	17,40	52,03	315,39
12	Basa Ampek Balai Tapan	7,83	5,31	8,70	21,32	29,15	13,75	12,89	6,26	10,88	22,19	17,40	34,80	190,48
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	8,70	14,53	20,45	0,87	61,34	13,05	0,44	1,74	15,23	8,70	16,36	79,61	241,02
14	Lunang	88,31	43,50	0,87	0,17	110,06	61,07	14,36	13,05	13,05	0,78	43,50	113,88	502,60
15	Silaui	19,00	19,70	19,52	25,31	24,26	20,09	22,48	28,88	22,79	24,61	25,13	27,96	279,73
J U M L A H		349,18	349,45	299,57	534,37	916,22	445,96	192,86	323,21	608,36	342,66	712,94	732,15	5,806,93

BUPATI PESIR SELATAN,

A L I A S

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 JANUARI 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN UNTUK KECAMATAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016

Kebutuhan Pupuk Organik Bersubsidi Untuk Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Marct	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Koto XI Tarusan	15,33	1,86	4,20	21,33	29,91	9,72	1,80	3,06	6,75	1,26	28,35	24,24	147,81
2	Bayang	12,75	16,50	15,00	21,75	24,75	8,94	5,01	15,96	24,45	6,75	19,50	15,99	187,35
3	IV Nagari Bayang Utara	4,50	7,77	3,27	0,15	0,45	1,23	0,15	8,49	6,15	2,25	1,50	4,80	40,71
4	IV Jurai	0,66	14,25	16,05	4,44	0,99	3,30	3,18	6,24	17,49	4,95	5,34	7,05	83,94
5	Batang Kapas	6,06	4,50	11,85	16,23	11,31	14,76	2,07	4,35	15,45	4,08	10,50	23,16	124,32
6	Sutera	3,75	3,75	4,35	34,50	36,00	10,20	4,05	13,05	23,40	20,34	25,35	13,53	192,27
7	Lengayang	6,15	10,35	13,86	38,49	43,65	9,90	3,18	10,23	33,33	9,30	31,05	16,50	225,99
8	Ranah Pesisir	15,00	15,00	2,55	13,68	31,83	26,25	8,91	17,10	18,06	24,90	18,24	9,66	201,18
9	Linggo Sari Baganti	3,00	3,00	3,66	11,25	39,00	9,93	6,00	6,00	12,45	9,00	28,20	18,45	149,94
10	Pancung Soal	7,50	11,13	6,93	1,50	13,05	9,66	6,30	1,50	5,10	9,63	36,51	12,78	121,59
11	Airpura	3,00	3,75	4,50	4,50	7,50	12,66	8,55	8,25	25,80	6,30	6,00	17,94	108,75
12	Basa Ampek Balai Tapan	2,70	1,83	3,00	7,35	10,05	4,74	4,44	2,16	3,75	7,65	6,00	12,00	65,67
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	3,00	5,01	7,05	0,30	21,15	4,50	0,15	0,60	5,25	3,00	5,64	27,45	83,10
14	Lunang	30,45	15,00	0,30	0,06	37,95	21,06	4,95	4,50	4,50	0,27	15,00	39,27	173,31
15	Silaut	4,69	4,93	4,87	5,52	6,16	4,72	5,89	7,75	5,65	6,28	6,46	5,40	68,32
J U M L A H		118,54	118,63	101,44	181,05	313,75	151,57	64,63	109,24	207,58	115,96	243,64	248,22	1.974,25

BUPATI PESISIR SELATAN,

A L W I S

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 JANUARI 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN UNTUK KEKAMATAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016

Kebutuhan Pupuk Urea Bersubsidi Untuk Komoditi Hortikultura Tahun 2016

No.	Kecamatan	Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Koto XI Tarusan	0,50	0,50	1,00	1,00	0,90	1,00	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	8,00
2	Bayang	0,40	0,50	0,90	1,00	1,00	0,90	0,50	0,60	0,50	0,60	0,50	0,60	8,00
3	IV Nagari Bayang Utara	0,25	0,30	0,40	0,50	0,40	0,50	0,40	0,30	0,40	0,30	0,30	0,40	4,45
4	IV Jurai	0,50	0,60	0,90	1,00	1,00	1,00	0,70	0,80	0,90	0,80	0,90	0,90	10,00
5	Batang Kapas	0,40	0,50	0,80	0,90	0,70	0,50	0,50	0,60	0,70	0,60	0,70	0,60	7,50
6	Sutera	0,70	0,70	1,00	1,00	0,90	1,00	0,80	0,80	0,90	0,90	1,00	0,80	10,50
7	Lengayang	0,60	0,80	1,20	1,50	1,50	1,00	0,90	1,00	1,00	0,70	0,80	1,00	12,00
8	Ranah Pesisir	0,50	0,70	0,90	1,20	1,00	1,25	0,75	0,80	0,90	1,00	1,00	1,00	11,00
9	Linggo Sari Baganti	0,70	0,70	0,90	0,80	0,90	0,90	0,70	0,90	0,90	0,80	0,90	0,90	10,00
10	Pancung Soal	0,30	0,40	0,40	0,50	0,60	0,40	0,30	0,40	0,30	0,40	0,50	0,50	5,00
11	Airpura	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,70	0,60	0,60	0,60	0,70	0,70	0,60	7,50
12	Basa Ampek Balai Tapan	0,40	0,50	0,60	0,60	0,70	0,60	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	6,00
13	Ranah Ampek HuluTapan	0,50	0,50	0,60	0,70	0,80	0,60	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,50	7,00
14	Lunang	0,60	0,70	0,70	0,90	0,80	0,70	0,60	0,60	0,50	0,50	0,70	0,70	8,00
15	Silaut	0,10	0,10	0,30	0,20	0,20	0,25	0,25	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	2,00
J U M L A H		6,85	8,00	11,20	12,50	12,20	11,30	8,70	9,10	9,20	8,90	9,60	9,40	116,95

BUPATI PESISIR SELATAN,

A L M I S

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 JANUARI 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN UNTUK KECAMATAN DI KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2016

Kebutuhan Pupuk SP-36 Bersubsidi Untuk Komoditi Horikultur Tahun 2016.

No.	Kecamatan	Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Koto XI Tarusan	0,20	0,30	0,30	0,50	0,60	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	5,00
2	Bayang	0,30	0,30	0,30	0,40	0,50	0,40	0,30	0,30	0,40	0,40	0,50	0,40	4,50
3	IV Nagari Bayang Utara	0,30	0,30	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	5,00
4	IV Jurai	0,30	0,30	0,40	0,50	0,40	0,50	0,40	0,50	0,40	0,50	0,40	0,40	5,00
5	Batang Kapas	0,25	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	4,00
6	Sutera	0,30	0,30	0,40	0,50	0,40	0,50	0,40	0,50	0,40	0,50	0,40	0,40	5,00
7	Lengayang	0,30	0,30	0,50	0,40	0,50	0,50	0,40	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	5,00
8	Ranah Pesisir	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,20	0,25	0,25	0,20	0,30	0,30	0,20	3,00
9	Linggo Sari Baganti	0,20	0,20	0,30	0,40	0,30	0,20	0,20	0,25	0,20	0,30	0,25	0,20	3,00
10	Pancung Soal	0,25	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	4,00
11	Airpura	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09	0,10	0,10	1,12
12	Basa Ampek Balai Tapan	0,20	0,25	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,25	0,30	0,25	0,25	0,20	3,50
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	0,07	0,07	0,10	0,10	0,10	0,09	0,07	0,08	0,09	0,08	0,08	0,07	1,00
14	Lunang	0,20	0,25	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,25	0,25	0,30	0,25	0,20	3,50
15	Silaut	0,07	0,07	0,10	0,10	0,10	0,09	0,07	0,08	0,09	0,08	0,08	0,07	1,00
J U M L A H		3,22	3,72	5,10	5,30	5,40	4,97	4,18	4,36	4,42	4,50	4,41	4,04	53,62

BUPATI PESIR SELATAN,

A L I S

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 JANUARI 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN UNTUK KECAMATAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016

Kebutuhan Pupuk ZA Bersubsidi Untuk komoditi Hortikultura Tahun 2016

No.	Kecamatan	Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Koto XI Tarusan	0,10	0,10	0,30	0,22	0,25	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	1,97
2	Bayang	0,10	0,20	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,15	0,10	2,50
3	IV Nagari Bayang Utara	0,15	0,15	0,25	0,25	0,35	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,60
4	IV Jurai	0,20	0,20	0,30	0,35	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10	2,65
5	Batang Kapas	0,10	0,20	0,30	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,10	2,45
6	Sutera	0,10	0,10	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	2,00
7	Lengayang	0,10	0,10	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	2,00
8	Ranah Pesisir	0,10	0,20	0,30	0,30	0,20	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,15	0,10	2,45
9	Linggo Sari Baganti	0,10	0,20	0,25	0,30	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,15	0,10	2,45
10	Pancung Soal	0,10	0,10	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	2,00
11	Airpura	0,10	0,10	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,50
12	Basa Ampek Balai Tapan	0,10	0,10	0,20	0,15	0,15	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	1,00
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	0,08	0,07	0,08	0,09	0,08	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,50
14	Lunang	0,10	0,10	0,20	0,15	0,15	0,20	0,10	0,10	0,10	0,07	0,08	0,08	1,00
15	Silaut	0,06	0,07	0,10	0,10	0,09	0,09	0,10	0,07	0,09	0,07	0,08	0,08	1,00
J U M L A H		1,59	1,99	3,78	3,51	3,32	3,09	2,79	2,05	2,07	2,55	1,77	1,56	30,07

BUPATI PESISIR SELATAN,

A L M I S

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 JANUARI 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN UNTUK KECAMATAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016

Kebutuhan Pupuk NPK Bersubsidi Untuk Komoditi Hortikultura Tahun 20156

No.	Kecamatan	Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Koto XI Tarusan	0,40	0,40	0,50	0,60	0,60	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	6,00
2	Bayang	0,50	0,70	0,80	0,75	0,90	0,90	0,75	0,75	0,75	0,80	0,70	0,70	9,00
3	IV Nagari Bayang Utara	0,30	0,40	0,50	0,60	0,60	0,60	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	5,50
4	IV Jurai	0,50	0,70	0,80	0,75	0,90	0,90	0,75	0,75	0,75	0,80	0,70	0,70	9,00
5	Batang Kapas	0,40	0,50	0,60	0,75	0,70	0,75	0,50	0,60	0,50	0,60	0,60	0,50	7,00
6	Sutera	0,40	0,40	0,50	0,60	0,60	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	6,00
7	Lengayang	0,40	0,50	0,60	0,75	0,70	0,75	0,50	0,60	0,50	0,60	0,60	0,50	7,00
8	Ranah Pesisir	0,50	0,70	0,80	0,75	0,90	0,90	0,75	0,75	0,75	0,80	0,70	0,70	9,00
9	Linggo Sari Baganti	0,50	0,70	0,80	0,75	0,90	0,90	0,75	0,75	0,75	0,80	0,70	0,70	9,00
10	Pancung Soal	0,30	0,40	0,50	0,60	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,40	0,30	5,00
11	Airpura	0,30	0,40	0,50	0,60	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,40	0,30	5,00
12	Basa Ampek Balai Tapan	0,40	0,50	0,60	0,75	0,70	0,75	0,50	0,60	0,50	0,60	0,60	0,50	7,00
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	0,40	0,40	0,50	0,60	0,60	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	5,38
14	Lunang	0,38	0,40	0,50	0,60	0,60	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,40	0,30	5,00
15	Silaut	0,30	0,40	0,50	0,60	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,40	0,30	5,00
J U M L A H		5,98	7,50	9,00	10,05	10,20	10,55	8,00	8,40	8,00	8,20	7,80	7,20	100,88

BUPATI PESISIR SELATAN,

ALVIS

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 JANUARI 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

SEKTOR PERTANIAN UNTUK KECAMATAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016

Kebutuhan Pupuk Organik Bersubsidi Untuk Komoditi Hortikultura Tahun 2016

No.	Kecamatan	Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Dcs	
1	Koto XI Tarusan	0,25	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	4,00
2	Bayang	0,30	0,40	0,50	0,60	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,40	0,30	5,00
3	IV Nagari Bayang Utara	0,30	0,40	0,50	0,60	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,40	0,30	5,00
4	IV Jurai	0,25	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	4,00
5	Batang Kapas	0,25	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	4,00
6	Sutera	0,25	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	4,00
7	Lengayang	0,25	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	5,00
8	Ranah Pesisir	0,30	0,40	0,50	0,60	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,40	0,30	5,00
9	Linggo Sari Baganti	0,30	0,40	0,50	0,60	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,40	0,30	4,00
10	Pancung Soal	0,25	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	3,45
11	Airputra	0,25	0,20	0,45	0,40	0,40	0,30	0,20	0,30	0,20	0,25	0,20	0,20	3,00
12	Basa Ampek Balai Tapan	0,20	0,20	0,30	0,30	0,40	0,30	0,25	0,20	0,25	0,20	0,20	0,20	3,00
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	0,20	0,20	0,30	0,30	0,40	0,30	0,25	0,20	0,25	0,20	0,20	0,20	3,00
14	Lunang	0,20	0,20	0,30	0,30	0,40	0,30	0,25	0,20	0,25	0,20	0,20	0,20	4,00
15	Silaut	0,25	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	60,45
J U M L A H		3,80	5,20	6,85	6,50	6,40	6,00	4,65	4,60	4,65	3,80	4,20	3,80	

BUPATI PESISIR SELATAN,

A L W I S

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 JANUARI 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN UNTUK KECAMATAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016

Kebutuhan Pupuk Urea Bersubsidi Untuk Komoditi Perkebunan Tahun 2016.

No	Kecamatan	Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan.	Feb.	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	
1	Koto XI Tarusan	0,20	0,20	0,30	0,30	0,40	0,30	0,25	0,20	0,25	0,20	0,20	0,20	3,00
2	Bayang	0,25	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	4,00
3	IV Nagari Bayang Utara	0,10	0,10	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	2,00
4	IV Jurai	0,20	0,20	0,30	0,30	0,40	0,30	0,25	0,20	0,25	0,20	0,20	0,20	3,00
5	Batang Kapas	0,20	0,20	0,30	0,30	0,40	0,30	0,25	0,20	0,25	0,20	0,20	0,20	3,00
6	Suera	0,80	1,20	1,40	1,50	1,50	1,50	1,20	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	14,00
7	Lengayang	0,80	1,20	1,40	1,50	1,50	1,50	1,20	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	14,00
8	Ranah Pesisir	0,80	1,20	1,40	2,00	2,00	1,50	1,20	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	15,00
9	Linggo Sari Baganti	0,80	1,20	1,40	2,00	1,50	2,00	1,20	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	15,00
10	Pancung Soal	0,50	0,50	0,60	0,70	0,80	0,60	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,50	7,00
11	Airpura	0,50	0,50	0,60	0,70	0,80	0,60	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,50	7,00
12	Basa Ampek Balai Tapan	0,50	0,70	0,90	1,20	1,00	1,25	0,75	0,80	0,90	1,00	1,00	1,00	11,00
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	0,50	0,70	0,90	1,20	1,00	1,25	0,75	0,80	0,90	1,00	1,00	1,00	11,00
14	Lunang	0,80	1,00	3,50	3,00	2,50	2,50	1,50	0,90	1,00	0,70	0,80	0,80	19,00
15	Silaut	1,50	1,00	3,50	3,00	2,50	2,50	1,50	1,00	1,00	0,70	0,80	1,00	20,00
	JUMLAH	8,45	10,30	17,30	18,35	16,95	16,70	11,55	9,50	10,15	9,25	9,75	9,75	148,00

Pj. BUPATI PESISIR SELATAN,

ALWIS

LAMPIRAN XIV: PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 JANUARI 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

SEKTOR PERTANIAN UNTUK KEKAMATAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016

Kebutuhan Pupuk SP-36 Bersubsidi Untuk Komoditi Perkebunan Tahun 2016.

No	Kecamatan	Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan.	Feb.	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	
1	Koto XI Tarusan	0,05	0,06	0,15	0,20	0,17	0,20	0,09	0,10	0,06	0,08	0,07	0,07	1,30
2	Bayang	0,10	0,10	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	2,00
3	IV Nagari Bayang Utara	0,05	0,06	0,15	0,20	0,17	0,20	0,09	0,10	0,06	0,08	0,07	0,07	1,30
4	IV Jurai	0,10	0,10	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	2,00
5	Batang Kapas	0,10	0,10	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	2,00
6	Sutera	0,25	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	4,00
7	Lengayang	0,25	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	0,30	0,35	0,30	0,25	0,25	4,50
8	Ranah Pesisir	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,60	0,30	0,40	0,30	0,40	0,50	0,50	5,50
9	Linggo Sari Baganti	0,30	0,40	0,40	0,50	0,60	0,40	0,30	0,40	0,30	0,40	0,50	0,50	5,00
10	Pancung Soal	0,20	0,20	0,35	0,40	0,50	0,40	0,25	0,20	0,25	0,30	0,25	0,20	3,50
11	Airpura	0,20	0,20	0,35	0,40	0,50	0,40	0,25	0,20	0,25	0,30	0,25	0,20	3,50
12	Basa Ampek Balai Tapan	0,50	0,50	0,60	0,70	0,80	0,60	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,50	7,00
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	0,40	0,40	0,60	0,70	0,50	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	6,00
14	Lunang	0,50	0,50	0,80	0,90	0,80	0,60	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,50	7,40
15	Silaut	0,50	0,50	0,60	0,70	0,80	0,60	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,50	7,00
	JUMLAH	3,80	4,32	6,40	6,95	7,19	6,10	4,58	4,30	4,47	5,01	4,64	4,24	62,00

Pj. BUPATI PESISIR SELATAN,

A L P I S

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 JANUARI 2016
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN UNTUK KEKAMATAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016

Kebutuhan Pupuk ZA Bersubsidi Untuk Komoditi Perkebunan Tahun 2016.

No	Kecamatan	Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan.	Feb.	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	
1	Koto XI Tarusan	0,10	0,10	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	2,00
2	Bayang	0,25	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	4,00
3	IV Nagari Bayang Utara	0,10	0,10	0,30	0,30	0,40	0,20	0,25	0,25	0,10	0,20	0,10	0,20	2,50
4	IV Jurai	0,25	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	0,30	0,35	0,30	0,25	0,25	4,50
5	Batang Kapas	0,25	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	4,00
6	Sutera	0,40	0,40	0,60	0,70	0,50	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	6,00
7	Lengayang	0,40	0,40	0,60	0,70	0,50	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	6,00
8	Ranah Pesisir	0,70	0,70	0,90	0,80	0,90	0,90	0,70	0,80	0,70	0,80	0,70	0,90	9,50
9	Linggo Sari Baganti	0,70	0,70	0,90	0,80	0,90	0,90	0,70	0,80	0,70	0,80	0,70	0,90	9,50
10	Pancung Soal	0,70	0,70	0,90	0,80	0,90	0,90	0,70	0,80	0,70	0,80	0,70	0,90	9,50
11	Airpura	0,70	0,70	0,90	0,80	0,90	0,90	0,70	0,80	0,70	0,80	0,70	0,90	9,50
12	Basa Ampek Balai Tapan	0,70	0,70	0,90	0,80	0,90	0,90	0,70	0,80	0,70	0,80	0,70	0,90	9,50
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	0,80	0,90	0,10	1,50	1,50	1,50	0,80	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	12,00
14	Lunang	0,80	1,20	1,70	2,00	2,00	1,80	1,20	1,00	1,00	1,20	1,10	1,00	16,00
15	Silaut	0,90	1,20	1,60	2,00	2,00	1,50	1,20	1,00	1,00	0,90	1,20	1,00	15,50
	JUMLAH	7,75	9,00	11,20	12,75	12,95	12,20	9,15	9,25	8,55	9,30	8,55	9,35	120,00

Pj. BUPATI PESISIR SELATAN,

ALWIS

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 JANUARI 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERKINGGI PUPUK BERSUBSIDI

SEKTOR PERTANIAN UNTUK KECAMATAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016

Kebutuhan Pupuk NPK Bersubsidi Untuk Komoditi Perkebunan Tahun 2016.

No	Kecamatan	Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan.	Feb.	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	
1	Koto XI Tarusan	0,60	0,50	0,70	0,80	0,80	0,90	0,70	0,60	0,70	0,60	0,60	0,50	8,00
2	Bayang	1,80	1,80	2,50	2,70	3,00	2,80	2,00	2,00	2,10	2,20	2,00	2,10	27,00
3	IV Nagari Bayang Utara	0,60	0,50	0,70	0,80	0,80	0,90	0,70	0,60	0,70	0,60	0,60	0,50	8,00
4	IV Jurai	1,50	1,20	2,50	2,50	2,50	2,20	2,00	2,00	1,80	1,50	1,70	1,60	23,00
5	Batang Kapas	1,50	1,70	2,80	2,70	2,50	2,20	2,00	2,00	1,80	2,00	2,00	1,80	25,00
6	Sutera	2,50	2,30	3,00	3,20	3,50	3,00	2,50	2,00	2,70	2,80	2,50	2,00	32,00
7	Lengayang	2,50	2,80	3,00	3,60	3,50	3,40	2,80	2,80	3,00	2,80	2,50	2,30	35,00
8	Ranah Pesisir	2,40	2,70	3,00	3,30	3,40	3,40	2,70	2,70	2,90	2,70	2,50	2,30	34,00
9	Linggo Sari Baganti	2,40	2,70	3,00	3,30	3,40	3,40	2,70	2,70	2,90	2,70	2,50	2,30	34,00
10	Pancung Soal	2,60	2,80	3,00	3,60	3,50	3,00	2,50	2,00	2,70	2,80	2,50	2,00	33,00
11	Airputra	2,00	2,20	2,50	2,70	3,00	2,80	2,00	2,00	2,30	2,20	2,00	2,30	28,00
12	Basa Ampek Balai Tapan	2,50	2,30	3,00	3,20	3,50	3,00	2,50	2,00	2,70	2,80	2,50	2,00	32,00
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	2,50	2,30	3,00	3,20	3,50	3,00	2,50	2,00	2,70	2,80	2,50	2,00	32,00
14	Lunang	3,50	3,50	4,00	4,50	5,00	4,50	4,00	3,50	4,00	3,50	3,50	4,50	48,00
15	Silaut	3,50	3,50	4,00	4,50	5,00	4,50	4,00	3,50	4,00	3,50	3,50	4,50	48,00
	JUMLAH	32,40	32,80	40,70	44,60	46,90	43,00	35,60	32,40	37,00	35,50	33,40	32,70	447,00

Pj. BUPATI PESISIR SELATAN,

A L I R I S

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 JANUARI 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

SEKTOR PERTANIAN UNTUK KECAMATAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016

Kebutuhan Pupuk Organik Bersubsidi Untuk Komoditi PerkebunanTahun 2016

No	Kecamatan	Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan.	Feb.	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	
1	Koto XI Tarusan	0,10	0,10	0,20	0,15	0,15	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,50
2	Bayang	0,10	0,10	0,20	0,15	0,15	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,50
3	IV Nagari Bayang Utara	0,10	0,10	0,20	0,15	0,15	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,50
4	IV Jurai	0,10	0,10	0,20	0,15	0,15	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,50
5	Batang Kapas	0,10	0,10	0,20	0,15	0,15	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,50
6	Sutera	0,10	0,10	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	2,00
7	Lengayang	0,10	0,10	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	2,00
8	Ranah Pesisir	0,10	0,10	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	2,00
9	Linggo Sari Baganti	0,10	0,10	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	2,00
10	Pancung Soal	0,10	0,10	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	2,00
11	Airpura	0,10	0,10	0,30	0,30	0,40	0,20	0,25	0,25	0,10	0,20	0,10	0,10	2,50
12	Basa Amppek Balai Tapan	0,10	0,10	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	2,00
13	Ranah Amppek Hulu Tapan	0,10	0,10	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	2,00
14	Lunang	0,20	0,20	0,30	0,30	0,40	0,30	0,25	0,20	0,25	0,20	0,20	0,20	3,00
15	Silaut	0,20	0,20	0,30	0,30	0,40	0,30	0,25	0,20	0,25	0,20	0,20	0,20	3,00
	JUMLAH	1,70	1,70	4,00	3,40	3,70	3,20	2,65	1,85	1,80	2,50	1,70	1,80	30,00

Pj. BUPATI PESISIR SELATAN,

AL WIR